

## **Dinamika Kebijakan dan Implementasi Program Desa Maju: Studi Literatur dan Rekomendasi Kebijakan**

Sri Nurindah Sari Arsyad <sup>1\*</sup>; Badu Ahmad <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia;

sriarsyad99@gmail.com ; baduahmad09@gmail.com

\* Correspondence : sriarsyad99@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengevaluasi implementasi Program Desa Maju di Indonesia dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee Grindle sebagai kerangka analisis. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas program, serta mengukur sejauh mana program ini mencapai tujuannya dalam konteks pembangunan desa. Data dikumpulkan melalui metode kajian literatur yang ekstensif dan dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi yang komprehensif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kendala finansial, keterbatasan sumber daya manusia, dan kompleksitas birokrasi merupakan hambatan utama yang menghalangi efektivitas implementasi program. Selain itu, kurangnya dukungan politik dan ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan kondisi lokal turut mempersulit pencapaian hasil yang diharapkan. Berdasarkan temuan ini, penelitian menyarankan peningkatan kapasitas lokal melalui pelatihan dan pendidikan, penyederhanaan prosedur birokrasi, serta penguatan alokasi anggaran sebagai langkah strategis untuk meningkatkan keberhasilan program di masa mendatang.

**Kata kunci :** *Implementasi, Kebijakan, Program Desa Maju*

### **ABSTRACT**

This research evaluates the implementation of the Desa Maju Program in Indonesia using Merilee Grindle's policy implementation theory as the analytical framework. The study aims to identify key factors influencing the program's effectiveness and to assess the extent to which the program achieves its objectives in the context of rural development. Data were collected through extensive literature review and analyzed using a comprehensive content analysis approach. The findings reveal that financial constraints, limited human resources, and bureaucratic complexities are the primary obstacles hindering the program's effective implementation. Additionally, a lack of political support and misalignment between central policies and local conditions further complicate the achievement of desired outcomes. Based on these findings, the study suggests enhancing local capacity through training and education, streamlining bureaucratic procedures, and strengthening budget allocation as strategic measures to improve the program's success in the future.

**Keywords :** *Implementation, Policy, Desa Maju Program*

## Pendahuluan

Pembangunan pedesaan di Indonesia telah menjadi fokus utama pemerintah, terutama dalam upaya mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah. Program Desa Maju (PDM) merupakan inisiatif strategis yang diluncurkan sebagai bagian dari upaya untuk mempercepat pembangunan di desa-desa di seluruh Indonesia. Program ini didesain untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan, seperti kemiskinan, keterbelakangan, dan akses terbatas terhadap layanan dasar.

Dasar hukum utama yang mendukung pelaksanaan Program Desa Maju adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kerangka hukum bagi desa sebagai entitas otonom dengan hak dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya mereka sendiri serta menentukan arah pembangunan sesuai kebutuhan lokal (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2020). Selain itu, program ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yang menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan sebagai langkah penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional (Bappenas, 2019).

Program Desa Maju mencakup berbagai aspek pembangunan, mulai dari peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, listrik, dan sanitasi, hingga peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan di pedesaan (Kementerian PPN/Bappenas, 2020). Program ini juga mendorong penguatan sektor pertanian dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi pedesaan. Dalam pelaksanaannya, Program Desa Maju tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kondisi fisik desa, tetapi juga berfokus pada pembangunan manusia melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan partisipasi aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Namun, meskipun terdapat banyak potensi positif, implementasi Program Desa Maju menghadapi berbagai tantangan signifikan. Berdasarkan data yang tersedia, hingga tahun 2021, masih terdapat lebih dari 4.000 desa yang dikategorikan sebagai desa sangat tertinggal, meskipun jumlah ini telah menurun dari tahun sebelumnya (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam beberapa aspek, masih banyak desa yang belum sepenuhnya merasakan manfaat dari program ini. Tantangan utama yang dihadapi mencakup kendala finansial, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal, serta hambatan birokrasi yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan program (Sari & Putra, 2021).

Pendekatan teoritis yang relevan untuk menganalisis implementasi Program Desa Maju adalah teori implementasi kebijakan oleh Merilee Grindle (1980) dan Edward George (1980). Grindle menekankan pentingnya memahami konteks sosial-politik, administratif, dan ekonomi di mana sebuah kebijakan diterapkan. Menurut Grindle, keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada interaksi antara berbagai aktor yang terlibat dalam proses implementasi, serta pada kapasitas institusi yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Edward George juga menekankan bahwa dukungan politik, tingkat partisipasi masyarakat, serta kapasitas administrasi lokal adalah faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan (Grindle, 1980; George, 1980).

Dalam konteks Program Desa Maju, tantangan implementasi tidak hanya terletak pada desain kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di lapangan.

Misalnya, meskipun program ini telah berhasil menurunkan jumlah desa tertinggal, banyak desa masih mengalami kesulitan dalam mengakses sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan. Hal ini sering kali disebabkan oleh kapasitas administrasi yang rendah di tingkat lokal serta kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah (Kusnadi, 2021).

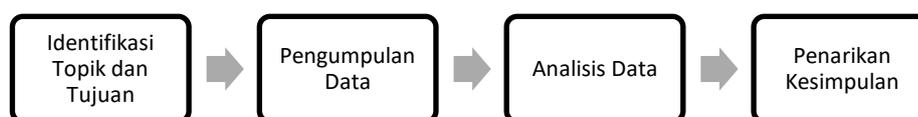
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan tantangan implementasi Program Desa Maju di seluruh Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan Grindle dan George, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana interaksi antara kebijakan, aktor yang terlibat, dan konteks lokal mempengaruhi hasil dari program ini. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi inovasi-inovasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas program di masa depan, khususnya dalam konteks peningkatan kapasitas lokal dan penguatan koordinasi antar lembaga.

Kontribusi baru dari penelitian ini adalah pengembangan model implementasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi lokal, yang diharapkan dapat menjadi panduan bagi pembuat kebijakan dalam mengoptimalkan pelaksanaan program-program pembangunan pedesaan lainnya. Penelitian ini tidak hanya relevan bagi akademisi yang tertarik pada studi kebijakan publik, tetapi juga bagi praktisi yang terlibat langsung dalam proses pembangunan di pedesaan. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya mewujudkan pembangunan pedesaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk memahami fenomena kebijakan Program Desa Maju melalui analisis berbagai literatur yang relevan. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber yang sudah ada, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen resmi.

Gambar 1. Prosedur Penelitian



Proses penelitian ini dimulai dengan tahap Identifikasi Topik dan Tujuan Penelitian, di mana peneliti menentukan fokus penelitian yang berpusat pada analisis kebijakan dan implementasi Program Desa Maju. Tujuan utama penelitian ini adalah mengeksplorasi sejauh mana program ini berdampak pada pembangunan desa di Indonesia. Dalam tahap awal ini, perumusan topik dan tujuan memberikan arah yang jelas terhadap upaya analisis kebijakan yang ingin dicapai, terutama dalam konteks pembangunan desa.

Tahap kedua adalah Pengumpulan Data yang dilakukan melalui metode studi kepustakaan. Pengumpulan data ini melibatkan proses selektif berdasarkan kriteria inklusi yang dirancang secara cermat, yaitu relevansi topik penelitian, kualitas sumber, dan kredibilitas penulis. Studi kepustakaan menjadi metode utama karena sumber-sumber

literatur yang relevan—termasuk buku, artikel jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan dokumen kebijakan—dapat memperkuat analisis mengenai pelaksanaan Program Desa Maju. Dengan memilih literatur yang berkualitas dan kredibel, peneliti memastikan bahwa data yang dikumpulkan memiliki validitas dan keterkaitan yang tinggi terhadap permasalahan penelitian.

Pada tahap ketiga, yaitu Analisis Data, peneliti menerapkan metode analisis isi (content analysis). Melalui teknik ini, informasi dari literatur dikelompokkan berdasarkan tema-tema kunci yang berkaitan erat dengan pertanyaan penelitian. Proses analisis ini tidak hanya mencari pola atau konsep berulang tetapi juga menyoroti gagasan utama yang konsisten di berbagai sumber. Hasil dari proses ini adalah temuan-temuan tematik yang dapat memberikan jawaban konkret terhadap tujuan penelitian dan memperdalam pemahaman tentang program yang sedang dianalisis.

Tahap terakhir adalah Penarikan Kesimpulan, di mana peneliti merumuskan kesimpulan berdasarkan bukti yang diperoleh dari berbagai literatur. Kesimpulan ini tidak hanya menggambarkan implementasi Program Desa Maju, tetapi juga mencerminkan pemahaman mendalam mengenai dampak yang ditimbulkan oleh program tersebut terhadap pembangunan desa. Hasil akhir dari penelitian ini memberikan landasan ilmiah yang memperkuat wawasan tentang kebijakan desa dan dampaknya, sehingga dapat menjadi rujukan untuk pengambilan kebijakan yang lebih efektif di masa mendatang.

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan teori Grindle, ada dua poin yang dijelaskan dalam menjelaskan implementasi kebijakan. Yang pertama, *Contents of Policy* dan yang kedua *Context of Implementation*. Sehingga peneliti memaparkan hasilnya dalam artikel ini. *Contents of Policy* mencakup berbagai aspek seperti kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, tipe manfaat yang akan diberikan, sejauh mana kebijakan tersebut berpotensi mengubah keseimbangan kekuasaan, dan kelayakan kebijakan itu sendiri. Dalam konteks Program Desa Maju, penulis menguraikan poin-poin ini secara rinci, merujuk *Contents of Policy*

### a. Kepentingan yang Dipengaruhi oleh Kebijakan

Kebijakan Program Desa Maju secara langsung mempengaruhi berbagai pemangku kepentingan, terutama masyarakat desa, pemerintah daerah, dan pihak swasta (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2018). Program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan menyediakan infrastruktur dasar, layanan pendidikan, dan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini sejalan dengan temuan yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangatlah penting untuk keberhasilan program ini. Masyarakat yang terlibat merasa memiliki program tersebut, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas implementasi program. Program pengembangan desa maju dan mandiri bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mengelola aset (Farida, 2021).

Lebih lanjut, kepentingan pemerintah daerah dalam program ini adalah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Pihak swasta juga memiliki kepentingan dalam hal kolaborasi yang bisa menguntungkan kedua belah pihak melalui investasi di sektor-sektor produktif di pedesaan.

### **b. Tipe Manfaat yang Diberikan**

Program Desa Maju menawarkan manfaat yang beragam dan signifikan. Manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat desa meliputi peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, infrastruktur seperti jalan desa yang diperbaiki mempermudah akses ke pasar, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Mendorong desa untuk membangun kemandirian ekonomi melalui pembentukan BUMDes yang berfungsi sebagai penopang ekonomi lokal" (Suartini & Rohaya, 2022).

Dalam beberapa tahun terakhir, program ini telah berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat desa dan penurunan tingkat kemiskinan (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2021). Manfaat tidak langsung juga dapat diamati dari segi peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam berpartisipasi dalam pembangunan. Pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi lokal, terutama di sektor pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), membantu menciptakan sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan. Program ini juga menekankan pentingnya pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel, yang diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (World Bank, 2018).

### **c. Potensi Perubahan Keseimbangan Kekuasaan**

Kebijakan yang diimplementasikan melalui Program Desa Maju juga memiliki potensi untuk mengubah keseimbangan kekuasaan di tingkat lokal. Sebelumnya, pemerintah pusat memegang kendali penuh atas alokasi dana dan keputusan pembangunan di pedesaan. Namun, dengan adanya program ini, pemerintah daerah dan masyarakat desa memiliki peran yang lebih besar dalam menentukan prioritas pembangunan di wilayah mereka masing-masing. Ini adalah perubahan yang signifikan dari pendekatan top-down menjadi pendekatan bottom-up, di mana masyarakat desa memiliki suara yang lebih besar dalam menentukan arah pembangunan desa mereka. Hal ini juga didukung oleh penelitian Program *Smart Village* bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi" (Rahman, 2022).

Perubahan keseimbangan kekuasaan ini juga terlihat dalam upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dengan terlibatnya berbagai pemangku kepentingan, termasuk LSM dan mitra internasional, proses pengambilan keputusan menjadi lebih terbuka dan partisipatif. Hal ini diharapkan dapat mengurangi korupsi dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana.

### **d. Kelayakan Kebijakan**

Berdasarkan gambar 1 di bawah bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencatat, jumlah desa dengan status mandiri dan maju di Indonesia mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir. Di sisi lain, jumlah desa berstatus berkembang dan tertinggal terus menunjukkan penurunan. Pada 2023, jumlah desa berstatus mandiri sebanyak 11.456 desa. Angka tersebut bertambah 10.616 desa dibandingkan tahun 2019 yang masih berjumlah 840 desa. Sebanyak 23.030 desa di Indonesia berstatus desa maju pada tahun lalu. Jumlahnya meningkat hingga 14.383 desa jika dibandingkan posisi tahun 2019 yang sebanyak 8.647 desa.

Gambar 1. Jumlah Desa di Indonesia Menurut Statusnya (2019-2023)



Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Kemudian, jumlah desa dengan status berkembang sebanyak 28.752 desa pada 2023 atau berkurang 9.433 desa dari tahun 2019 yang sebanyak 38.185 desa. Jumlah desa tertinggal juga berkurang signifikan menjadi 6.803 desa dari 17.626 desa pada 2019. Namun, desa dengan status sangat tertinggal cenderung mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir. Pada 2023, jumlahnya sebanyak 4.382 desa atau bertambah 846 desa dibandingkan tahun 2019 (Data Indonesia, 2023).

Dari segi kelayakan, Program Desa Maju dianggap sebagai kebijakan yang layak dan dapat diimplementasikan secara efektif. Program ini telah menunjukkan keberhasilan dalam berbagai aspek pembangunan desa, meskipun menghadapi tantangan-tantangan tertentu. Salah satu tantangan utama adalah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, yang terkadang mengalami hambatan administratif. Namun, dengan adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang kuat, tantangan ini dapat diminimalisir (Asian Development Bank, 2020).

Kelayakan kebijakan ini juga didukung oleh keberlanjutan program yang terus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan terkini. Program ini tidak hanya berfokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga pada dampak jangka panjang yang dapat dirasakan oleh masyarakat desa. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam implementasi program, kebijakan ini memiliki peluang besar untuk terus berkembang dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat (Daryanto, 2019).

#### e. Penyelenggara Program

Sangatlah penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan rencana. Sebagai penulis, saya mengamati bahwa para pelaksana di tingkat desa, terutama kepala desa, perangkat desa, serta pendamping desa, memegang peranan kunci dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata di lapangan.

Kepala desa, sebagai pemimpin lokal, bertanggung jawab untuk mengoordinasikan kegiatan pembangunan dan memastikan bahwa program ini sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat. Dalam penelitian saya, ditemukan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kemampuan kepemimpinan dan komitmen kepala desa dalam melaksanakan kebijakan ini. Kepala desa yang memiliki visi pembangunan yang jelas dan berkomitmen tinggi cenderung berhasil dalam mengimplementasikan program dengan lebih efektif (Idris & Halim, 2018).

Namun, saya juga menemukan adanya variasi dalam kapasitas para pelaksana kebijakan di tingkat desa. Beberapa desa yang kurang memiliki sumber daya manusia yang terampil mengalami kesulitan dalam mengelola program ini secara efektif. Selain itu, pelaksanaan program ini juga dipengaruhi oleh dukungan dari pemerintah daerah dan pusat. Jika dukungan tersebut kuat, maka implementasi di tingkat lokal dapat berjalan dengan lebih lancar. Sebaliknya, jika terjadi kekurangan dukungan, seperti dalam hal bimbingan teknis atau pendanaan yang tepat waktu, maka implementasi program dapat terhambat (Harahap, Fauzi, & Sabrina, 2017).

#### **f. Sumber daya yang digunakan**

Aspek terakhir dari *Contents of Policy* yang sangat krusial adalah sumber daya yang dialokasikan (*resources committed*) untuk mendukung pelaksanaan Program Desa Maju. Sumber daya ini mencakup dana, tenaga kerja, teknologi, dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa program dapat dijalankan dengan baik.

Dalam Program Desa Maju, sumber daya keuangan utama berasal dari Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada setiap desa. Dana ini dirancang untuk digunakan dalam berbagai kegiatan pembangunan yang telah disepakati dalam musyawarah desa. Namun, penelitian saya menunjukkan bahwa alokasi dan pengelolaan dana ini sering kali menemui berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterlambatan dalam pencairan dana, yang mengakibatkan penundaan dalam pelaksanaan program. Selain itu, ada pula masalah terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana, di mana beberapa kasus penyalahgunaan anggaran ditemukan di beberapa desa (Economic Planning Unit, Prime Minister's Department, Malaysia, 2020)

Selain dana, sumber daya manusia juga menjadi komponen penting. Program ini sangat mengandalkan kapasitas perangkat desa dan tenaga pendamping yang ditugaskan untuk membantu pelaksanaan program di lapangan. Namun, kapasitas sumber daya manusia ini tidak selalu merata. Di beberapa desa, keterbatasan dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman para pelaksana program menjadi hambatan dalam mencapai tujuan program secara maksimal. Tetapi jika sumber daya digunakan secara maksimal akan membawakan dampak positif pada implementasi programnya Program PRIMA menunjukkan relevansi dan efektivitas dalam meningkatkan keterampilan manajemen usaha perempuan meskipun belum optimal dalam kesejahteraan keluarga" (Budiani, 2023). Implementasi program desa maju Inhil Jaya menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat melalui penguatan kapasitas lokal" (Prasetyo, 2020).

Dari sisi teknologi dan infrastruktur, meskipun telah terjadi peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, saya menemukan bahwa masih ada desa-desa yang belum sepenuhnya terlayani oleh infrastruktur dasar seperti akses internet dan listrik yang stabil. Pembangunan infrastruktur desa yang baik dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat desa" (Hadi, 2020). Hal ini membatasi kemampuan desa dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaksanaan program, seperti dalam hal pelaporan dan monitoring yang berbasis digital (Economic Planning Unit, Prime Minister's Department, Malaysia, 2020)

Selanjutnya dalam aspek *context of implementation* dari Program Desa Maju dengan menggunakan kerangka teori Merilee Grindle, yang mencakup tiga komponen utama: kekuatan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat; karakteristik institusi dan rezim; serta tingkat kepatuhan dan responsivitas terhadap kebijakan. Ketiga elemen ini memberikan

panduan yang komprehensif dalam memahami bagaimana konteks implementasi memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan, khususnya dalam program pembangunan desa di Indonesia.

**a. *Power, Interest, and Strategies of Actors Involved***

Dalam konteks implementasi Program Desa Maju, kekuatan, kepentingan, dan strategi para aktor yang terlibat memainkan peran yang sangat penting. Program ini melibatkan berbagai aktor mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepala desa, masyarakat, hingga pihak swasta.

Pemerintah pusat, melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, memegang kekuatan utama dalam hal penyediaan anggaran dan kebijakan. Kepentingan utama mereka adalah memastikan program ini dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Strategi yang digunakan oleh pemerintah pusat termasuk alokasi Dana Desa yang terus meningkat setiap tahunnya, pengawasan ketat melalui berbagai instrumen evaluasi, serta pelatihan dan bimbingan teknis kepada pemerintah daerah dan desa.

Di tingkat lokal, kepala desa dan perangkatnya memiliki kekuatan yang cukup signifikan dalam mengatur prioritas pembangunan desa. Kepentingan mereka sering kali terkait dengan pemenuhan janji politik kepada masyarakat dan peningkatan reputasi di mata pemilih. Strategi yang sering digunakan oleh kepala desa adalah pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan desa, di mana masyarakat diajak berpartisipasi aktif dalam musyawarah desa untuk menentukan penggunaan Dana Desa. Namun, ada juga kepala desa yang menggunakan strategi yang kurang transparan, terutama dalam hal pengelolaan anggaran, yang dapat mengarah pada praktik korupsi.

Masyarakat desa sendiri memiliki kepentingan yang sangat mendasar, yaitu peningkatan kualitas hidup mereka melalui akses yang lebih baik terhadap infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Strategi yang mereka gunakan termasuk partisipasi aktif dalam musyawarah desa dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program di lapangan. Namun, partisipasi ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan kesadaran politik masyarakat. Program desa mandiri di Indragiri Hilir berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan (Setiawan, 2019).

Pihak swasta juga mulai terlibat dalam Program Desa Maju, terutama dalam sektor-sektor yang berkaitan dengan ekonomi lokal seperti pertanian, perdagangan, dan pariwisata. Kepentingan mereka adalah mendapatkan keuntungan dari investasi yang mereka lakukan di desa-desa, sementara strategi yang mereka gunakan melibatkan kerja sama dengan pemerintah desa dan komunitas lokal untuk memastikan bahwa investasi mereka diterima dengan baik dan dapat memberikan dampak positif (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2021).

**b. *Institution and Regime Characteristics***

Karakteristik institusi dan rezim di Indonesia sangat mempengaruhi cara Program Desa Maju diimplementasikan. Institusi yang kuat dan stabil cenderung mendukung pelaksanaan program yang efektif. Dalam konteks ini, saya mencatat bahwa Kementerian Desa, \*Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah membangun berbagai kerangka

kerja dan regulasi yang mendukung pelaksanaan program ini. Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan koordinasi antar lembaga di berbagai tingkatan pemerintahan.

Salah satu karakteristik institusi yang berpengaruh adalah birokrasi yang kompleks dan terkadang lamban. Proses birokrasi yang panjang dalam pencairan Dana Desa, misalnya, sering kali menghambat implementasi program di lapangan. Selain itu, otonomi daerah yang memberikan kekuasaan besar kepada pemerintah daerah juga memiliki dua sisi; di satu sisi, otonomi memungkinkan adaptasi kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi lokal, tetapi di sisi lain, dapat memunculkan variasi implementasi yang sangat signifikan antar daerah, tergantung pada kapasitas dan komitmen masing-masing pemerintah daerah (Asian Development Bank, 2020)

Regim yang berkuasa di tingkat nasional juga mempengaruhi arah kebijakan Program Desa Maju. Saya menemukan bahwa di bawah pemerintahan yang pro terhadap desentralisasi dan pembangunan desa, Program Desa Maju mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari peningkatan anggaran dan penguatan kerangka regulasi yang mendukung program ini. Namun, keberlanjutan program ini dapat terancam jika terjadi perubahan rezim yang tidak lagi memprioritaskan pembangunan desa (Harahap, Fauzi, & Sabrina, 2017)

Selain itu, karakteristik institusi desa, seperti struktur pemerintahan desa yang beragam dan tingkat kemandirian desa, juga mempengaruhi implementasi program. Desa-desanya yang memiliki struktur pemerintahan yang solid dan pemimpin yang berintegritas cenderung lebih berhasil dalam melaksanakan program ini. Sebaliknya, desa yang mengalami konflik internal atau memiliki pemimpin yang kurang kompeten sering kali mengalami kesulitan dalam menjalankan program ini.

### c. *Compliance and Responsiveness*

Tingkat kepatuhan (*compliance*) dan responsivitas terhadap kebijakan juga menjadi indikator penting dalam keberhasilan implementasi Program Desa Maju. Kepatuhan di sini mengacu pada sejauh mana para pelaksana kebijakan di tingkat desa mengikuti regulasi dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, responsivitas mengacu pada kemampuan pemerintah desa untuk merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat secara efektif.

Dalam penelitian saya, ditemukan bahwa tingkat kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur penggunaan Dana Desa umumnya cukup tinggi, terutama karena adanya mekanisme pengawasan yang ketat dari pemerintah pusat dan masyarakat. Namun, kepatuhan ini terkadang hanya bersifat administratif, di mana pemerintah desa mengikuti prosedur secara formal tanpa benar-benar memahami atau memprioritaskan tujuan program. Hal ini dapat mengakibatkan pelaksanaan program yang kurang efektif dan tidak tepat sasaran.

Responsivitas pemerintah desa terhadap kebutuhan masyarakat juga bervariasi. Desa yang pemimpinnya memiliki keterlibatan tinggi dengan masyarakat cenderung lebih responsif dalam menyesuaikan program dengan kondisi lokal (Economic Planning Unit, Prime Minister's Department, Malaysia, 2020). Sebagai contoh, di beberapa desa, penggunaan Dana Desa disesuaikan dengan prioritas masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur jalan atau penyediaan fasilitas kesehatan yang sangat dibutuhkan. Di sisi lain, ada desa yang pemimpinnya kurang responsif, sehingga program yang dijalankan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Kesimpulannya, konteks implementasi Program Desa Maju sangat dipengaruhi oleh dinamika kekuatan dan kepentingan aktor yang terlibat, karakteristik institusi dan rezim yang ada, serta tingkat kepatuhan dan responsivitas terhadap kebijakan. Ketiga faktor ini harus dipertimbangkan secara cermat untuk meningkatkan efektivitas dan keberhasilan implementasi program di lapangan. Dengan memahami konteks ini, saya yakin bahwa kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi lokal dapat dirumuskan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Indonesia.

## Kesimpulan

Berdasarkan teori Merilee Grindle, dua elemen utama, yaitu "*Contents of Policy*" dan "*Context of Implementation*," berperan penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan. Kejelasan tujuan kebijakan dan alokasi sumber daya yang memadai terbukti menjadi faktor krusial dalam mencapai sasaran program, meskipun terdapat kendala terkait dengan alokasi sumber daya dan dukungan politik. Selain itu, kondisi sosial, ekonomi, dan kapasitas birokrasi di tingkat lokal juga sangat memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan, dengan keterbatasan sumber daya manusia dan kompleksitas birokrasi menjadi hambatan utama. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan responsif terhadap kondisi lokal dalam implementasi kebijakan serta memberikan wawasan penting bagi pengembangan kebijakan pembangunan desa di masa depan.

## Referensi

- Anggraeni, D. (2021). *Implementasi Jejaring Desa Wisata dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan*. Universitas Muhammadiyah Sinjai.
- Asian Development Bank. (2020). *Indonesia: Sustainable and Inclusive Rural Development Program*. Retrieved from <https://www.adb.org/>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Potensi Desa 2020*. Jakarta: BPS.
- Bappenas. (2019). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Budiani, N. W. (2023). Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Samarinda. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Data Indonesia. (2023). Data jumlah desa di Indonesia menurut statusnya pada 2019–2023. Diakses pada 27 Agustus 2024 dari <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-desa-di-indonesia-menurut-statusnya-pada-20192023>.
- Farida, T. F. J. (2021). *Implementasi Program Pengembangan Desa Maju dan Mandiri (P2DM2) di Kabupaten Jember*. Universitas Muhammadiyah Jember.
- Grindle, M. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton: Princeton University Press.
- Hadi, S. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Desa di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). *Laporan Kinerja Tahun 2019*. Jakarta: Kementerian Desa.

- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2019). *Panduan Umum Program Pembangunan Desa Tahun 2019*. Retrieved from [https://www.kemendes.go.id/app/laporan\\_keuangan/data/buku/PUP2M\\_2019.pdf](https://www.kemendes.go.id/app/laporan_keuangan/data/buku/PUP2M_2019.pdf)
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Laporan Pembangunan Desa Tahun 2020*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Kurniawan, A., & Yulianto, E. (2021). Peranan Teknologi Informasi dalam Program Desa Maju di Indonesia. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*.
- Kusnadi, D. (2021). Tantangan Implementasi Program Desa Maju. *Jurnal Pembangunan Desa*, 5(2), 145–158.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Prasetyo, E. (2020). Pengaruh Implementasi Program Desa Maju Inhil Jaya Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat. UIN Suska Riau.
- Prasetyo, H. (2019). Desentralisasi dan Pembangunan Desa di Indonesia: Studi Kasus Program Desa Maju. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(2), 135–150.
- Rahman, A. (2022). Implementasi Program Smart Village di Provinsi Lampung. Universitas Lampung.
- Sari, A., & Putra, H. (2021). Evaluasi Program Desa Maju di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(3), 200–210.
- Setiawan, G. (2019). Studi Kasus Implementasi Program Desa Mandiri di Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Suartini, & Rohaya, N. (2022). Implementasi Nawa Cita dalam Pembangunan Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan*.
- World Bank. (2018). *Support to Rural and Regional Development Program: Project Appraisal Document*. Retrieved from <https://documents1.worldbank.org/>